



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKIP)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
T A H U N 2 0 2 0**

## **KATA PENGANTAR**

**P**erwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal penting dalam upaya mewujudkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang cepat berubah dan masyarakat yang semakin kritis terhadap pelayanan aparatur pemerintah, instansi pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik melalui kinerja dan pelayanan publik yang memadai. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara setiap akhir tahun melaporkan hasil kinerjanya kepada intitusi di atasnya yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kewajiban sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipercaya. Sesuai ketentuan penyusunan Laporan Kinerja maka seperti tahun-tahun sebelumnya Dinas Kominfo Provsu juga melaporkan hasil capaian kinerja selama setahun dengan memakai pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara akuntabel.

Laporan Kinerja Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan ini maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD.

Demikianlah kami laporkan, semoga Laporan Kinerja Dinas Kominfo Provsu tahun 2020 ini dapat bermanfaat sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan/keputusan untuk menetapkan program/kegiatan urusan komunikasi dan informatika yang lebih terarah, efektif, berdaya guna dan berhasil guna pada tahun-tahun mendatang. Kami mengharapkan segala saran dan kritik membangun untuk perbaikan dan kebaikan kinerja Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara.

Medan, Januari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Ir. H. IRMAN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610905 199003 1 004

## DAFTAR ISI

	Halaman :
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	iii
<b>PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....</b>	iii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Dasar Hukum.....	2
1.4 Struktur Organisasi .....	3
1.5 Fungsi dan Tugas.....	6
1.6 Sistematika .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	8
2.1 Rencana Strategis.....	8
2.2 Rencana Kinerja.....	12
2.3 Perjanjian Kinerja.....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	16
3.1. Capaian Kinerja Berdasarkan IKU.....	16
3.2. Capaian Kinerja Berdasarkan RPJMD .....	26
3.3. Capaian Kinerja Program/Kegiatan. ....	31
3.4. Keberhasilan, Kegagalan, serta Alternatif Solusi yang Dilakukan.....	33
3.5 Akuntabilitas Keuangan.....	34
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	36
<b>LAMPIRAN :</b>	
1. Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Provsu Tahun 2020	
2. Penetapan Kinerja Dinas Kominfo Provsu Tahun 2020	
3. Realisasi Penetapan Kinerja Dinas Kominfo Provsu Tahun 2020	

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA**  
**UTARA**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Medan, Januari 2021

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Sumatera Utara

H. M. Ayub, SE  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630814 199403 1 007

# **Ikhtisar Eksekutif**

**D**alam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 disebutkan bahwa Visi Sumatera Utara adalah “ Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat ”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi, tujuan, dan sasaran strategis yang dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya dengan kebijakan yang tepat dan terarah melalui program dan kegiatan. Berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis, Dinas Kominfo Provsu telah menetapkan program dan kegiatan dalam sebuah dokumen penetapan kinerja.

Dokumen penetapan kinerja mengacu kepada Perpres No. 29 tahun 2014 dan Permen PANRB No. 53 Tahun 2014. Dalam peraturan ini, pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi bukan lagi berdasarkan PKK dan PPS yang lebih pada capaian keluaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), tetapi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, secara umum capaian sasaran strategis Dinas Kominfo Provsu tahun 2020 dengan persentase sebesar **96 %**. Jika dibandingkan pada tahun 2019 capaiannya sebesar **73 %**. Capaian kinerja Dinas Kominfo Provsu tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 23 %.

Tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis Dinas Kominfo Provsu tahun 2020 mengacu IKU dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis Meningkatkan penyebaran informasi publik dengan indikator kinerja Utama jumlah Informasi Publik yang terpublikasi target 495 kali, realisasi capaian kinerja sebesar 368 kali
2. Sasaran strategis Meningkatkan kualitas data pembangunan Sumatera Utara dengan indikator kinerja Utama Persentase data OPD yang terhimpun target 50 % , persentase realisasi capaian kinerja sebesar 71 %.
3. Sasaran strategis Meningkatkan pelaksanaan Sistem Pemerintah yang berbasis Elektronik , dengan indikator kinerja Utama Persentase Infrastruktur TIK yang Terintegrasi targetnya 41 % , persentase realisasi capaian kinerja sebesar 44 %
4. Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi Daerah , dengan indikator kinerja Utama Persentase Terselenggaranya tata kelola persandian dalam meningkatkan keamanan Informasi targetnya 25 % , persentase realisasi capaian kinerja sebesar 10 %

Dari sisi akuntabilitas keuangan, serapan keuangan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara pada 2020 serapan keuangannya sebesar **94,78 %** mengalami peningkatan sebesar 8,54 % dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar **86,24 %**.

# Bab I

## ***Pendahuluan***

### **1.1 LATAR BELAKANG**

**T**erselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Oleh karena itu laporan kinerja instansi harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu laporan kinerja juga harus memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (*reliable*), berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan. Sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah, Dinas Kominfo Provsu sebagai pelaksana urusan bidang komunikasi dan informatika, mempertanggung-jawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi ke depannya.

Laporan Kinerja Dinas Kominfo Provsu Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan inilah, maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi bukan lagi berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang lebih pada capaian keluaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tetapi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kominfo Provsu tahun 2020 diharapkan secara umum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi dan secara internal dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara baik dan akuntabel, efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat maupun lingkungan.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah sebagai sarana bagi Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dalam menyiapkan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan sesuai visi dan misi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good government dan clean government).

## **1.3. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Undang – undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reuiu Atas laporan Kinerja.

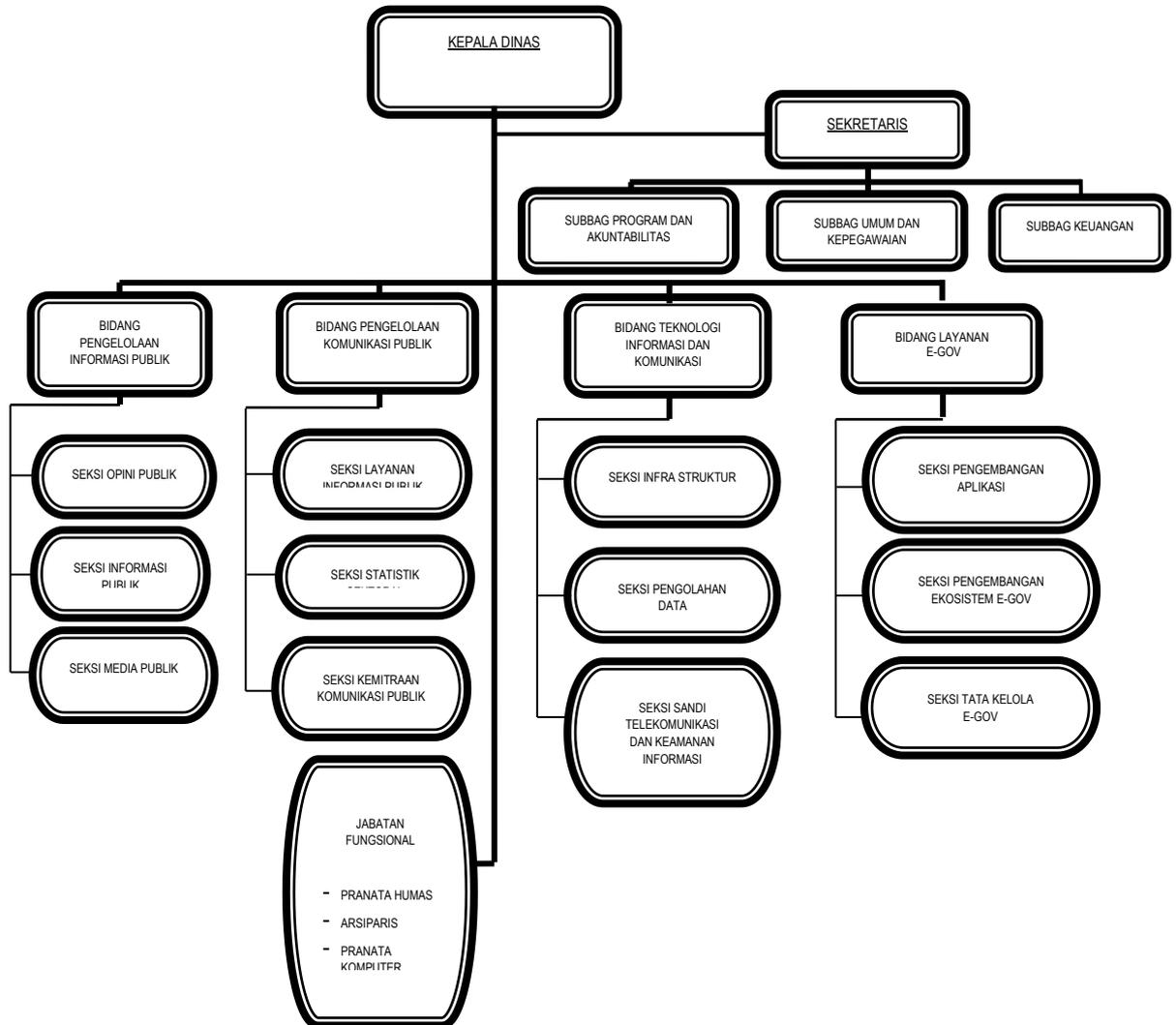
9. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
11. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara.
12. Surat Sekretaris Daerah Sumatera Utara Nomor 061/214/ORG tanggal 12 Januari 2021 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK).

#### **1.4 STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya secara hirarkis disusun struktur organisasi kelembagaan Dinas Kominfo Provsu terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Bidang Pengelola Informasi Publik
4. Bidang Pengelola Komunikasi Publik
5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Bidang layanan e- Government

Bagan 1  
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Provsu secara baik dan akuntabel, kualitas Sumber Daya Manusia sangat penting. Saat ini, berdasarkan data dari Subbagian Umum Dinas Kominfo Provsu per 31 Desember 2020, Dinas Kominfo Provsu memiliki 96 Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi keilmuan yang beragam. Adapun komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1

Komposisi Pegawai Dinas Kominfo Provsu per 31 Desember 2020

**1.4.1. Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah
	<b>Jabatan Struktural</b>	<b>19</b>
	Eselon II (Kepala Dinas)	1
	Eselon III (Kepala Bidang/Sekretaris/Ka. UPTD)	5
	Eselon IV (Kepala Sub.bag/Subbid/Seksi)	13
	<b>Jabatan Fungsional</b>	<b>4</b>
	Pranata Humas	2
	Arsiparis	2

**1.4.2. Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan**

No	Golongan	Jumlah
1	IV-e / Pembina Utama	-
2	IV-d / Pembina Utama Madya	1
3	IV-c / Pembina Utama Muda	-
4	IV-b / Pembina Tk. I	3
5	IV-a / Pembina	5
6	III-d / Penata Tk. I	26
7	III-c / Penata	14
8	III-b / Penata Muda Tk. I	27
9	III-a / Penata Muda	8
10	II-d / Pengatur Tk. I	4
11	II-c / Pengatur	6
12	II-b / Pengatur Muda Tk. I	1
13	II-a / Pengatur Muda	1
	<b>J u m l a h</b>	<b>96</b>

### 1.4.3. Komposisi Pegawai berdasarkan Gender (Jenis Kelamin)

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan
1	IV-e	-	-
2	IV-d	1	-
3	IV-c	-	-
4	IV-b	1	2
5	IV-a	3	2
6	III-d	9	17
7	III-c	9	5
8	III-b	13	14
9	III-a	7	1
10	II-d	4	-
11	II-c	4	2
12	II-b	1	-
13	II-a	1	-
<b>Jumlah</b>		53	43

Sumber Data: Sub Bagian Umum Dinas Kominfo Provsu

### 1.5. FUNGSI DAN TUGAS

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada pasal 2 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika.

Untuk itu melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistika sektoral,

persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Penyelenggaraan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyelenggaraan evaluasi informasi dan komunikasi publik aplikasi informatika, statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Penyelenggaraan administrasi informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **1. 6. SISTEMATIKA**

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PeLaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ditetapkan sistematika laporan kinerja sebagai berikut :

### **- BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian mengenai gambaran umum organisasi dan sekilas pengantar lainnya.

### **- BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Berisi ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja).

### **- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian hasil pengukuran kinerja.

### **- BAB IV PENUTUP**

### **- LAMPIRAN**

## **Bab II**

### ***Perencanaan Kinerja***

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis (Renstra) merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif. Rencana Strategis merupakan bagian yang terintegrasi dari bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memiliki relevansi terhadap pengungkapan kinerja, serta merupakan dokumen perencanaan Dinas Kominfo Provsu untuk periode 5 (lima) tahun dan dijabarkan per tahun yang merupakan rangkaian pembangunan bidang komunikasi dan informatika berkelanjutan.

Renstra Dinas Kominfo Provsu 2019 - 2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2019 - 2023. Renstra disusun dengan berorientasi pada keberhasilan pelaksanaan RPJMD untuk mendukung pencapaian Visi “*Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat*”.

Dalam kurun waktu 2019 - 2023 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi, Kementerian Komunikasi dan Informatika dituntut berpandangan jauh ke depan, serta berupaya meningkatkan kualitas agar lebih profesional.

Berkaitan dengan itu, setiap aparatur Dinas Kominfo Provsu didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan kredibilitasnya sehingga dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta bekerja secara profesional dan efisien untuk mendukung tercapainya masyarakat informasi Indonesia. Untuk mencapai hasil yang diinginkan selama 5 (lima) tahun, Dinas Kominfo Provsu menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran serta rencana kerja yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun. Dalam rangka pencapaian-pencapaian tersebut, Dinas Kominfo Provsu menetapkan Visi yaitu “*Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis Teknologi Informatika Mendukung Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat*”

Untuk Misi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

**Misi Pertama,** Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;

**Misi Kedua,** Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi social yang kuat serta harmonis;

**Misi Ketiga,** Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri;

**Misi Keempat,** Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;

**Misi Kelima,** Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berprikemanusiaan dan beradab.

Sejalan dengan itu, misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara adalah Misi Kedua yaitu *“Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis,* dimana misi ini secara lebih spesifik dituangkan dalam tujuan peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan pencegahan korupsi. Melalui Misi II Sumatera Utara ini, Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dapat mewujudkan dengan :

- 1) Meningkatkan Penyediaan dan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- 2) Meningkatkan pengelolaan Aplikasi
- 3) Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkungan Provinsi
- 4) Meningkatkan pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.



Dalam rangka mencapai misi Sumatera Utara maka Dinas Kominfo Provsu, maka ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Berdasarkan hal itu, Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara menetapkan tujuan dan sasaran berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023.

Dalam kaitan itu, tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur dibidang Komunikasi dan Informatika dalam Peningkatan Kinerja
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Meningkatkan Data Statistik Sektoral
4. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik yang transparan dan partisipatif
5. Meningkatkan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Selanjutnya, untuk memberikan fokus penyusunan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas berdasarkan tujuan, maka ditetapkan sasaran. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran Dinas Kominfo Provsu adalah :

- 1) Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dibidang Komunikasi dan Informatika dalam peningkatan Kinerja
- 2) Terbangunnya Aplikasi dan Infrastruktur TIK terintegrasi
- 3) Tersedianya data statistik sektoral
- 4) Diseminasi Informasi melalui media Komunikasi dan Informasi
- 5) Pengelolaan Pemanfaatan persandian dalam meningkatkan keamanan informasi

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara

<b>VISI</b>		<b>SUMATERA UTARA, MAJU, AMAN dan BERMARTABAT</b>	
<b>MISI II</b>		<b>Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi social yang kuat serta harmonis</b>	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Pemenuhan kebutuhan pendukung melalui pengadaan dan pemeliharaan	Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran dan sarana operasional

		serta pemenuhan administrasi perkantoran	
Meningkatkannya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terbangunnya Aplikasi dan Infrastruktur TIK terintegrasi	Penerapan layanan e-Government	Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah melalui pemanfaatan TIK
Meningkatkan Data Statistik Sektoral	Tersedianya data statistik sektoral	Penyusunan dan Menganalisis data sektoral	Satu data
Meningkatkan pelayanan Informasi Publik yang transparan dan partisipatif	Diseminasi Informasi melalui media Informasi	Penyebaran Informasi dengan melibatkan media komunikasi dan media Informasi	Penguatan Mitra Media Komunikasi dan Media Informasi
Pengamanan Informasi pemerintah Daerah melalui Persandian	Pengelolaan Pemanfaatan persandian dalam meningkatkan keamanan informasi	penyelenggaraan keamanan informasi	Optimalisasi Organisasi Perangkat Daerah dalam penerapan pengamanan Informasi dan Persandian

## 2.2 RENCANA KINERJA

Rencana kerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kerja tahunan. Dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan.

Dalam dokumen laporan kinerja, capaian kinerja yang diukur oleh setiap instansi pemerintah adalah target kinerja yang diperjanjikan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan penetapan IKU di lingkungan instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Selain itu, berfungsi untuk memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan, menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait dan membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat diukur. Dalam menetapkan IKU, Dinas Kominfo Provsu mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023.

Rencana kerja Dinas Kominfo berdasarkan sasaran Strategis adalah

1. Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Publik dengan target 495 kali
2. Meningkatnya kualitas data pembangunan Sumatera Utara dengan target 50 %
3. Meningkatnya pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi Daerah dengan target 25 %
4. Meningkatnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan target 41 %

### **2.3 PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penetapan Kinerja dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Utara sebagai atasan langsung dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera sebagai eksekutor dari pelaksana program dan kebijakan sebagaimana yang telah digariskan dalam Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai tertuang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2020.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.  
Perjanjian Kinerja

<b>No</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik	Jumlah Informasi Publik yang terpublikasi	495 kali
2	Meningkatnya kualitas data Pembangunan Sumatera Utara	Persentase Data OPD yang terhimpun	50 %
		Persentase Infrastuktur TIK yang terintegrasi	41 %
		Persentase Terselenggaranya tata kelola Persandian dalam meningkatkan keamanan informasi Daerah	25 %

	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 485.139.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 185.540.000,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 3.938.746.013,-	APBD
4	Program Penyelenggaraan pengamanan Informasi pemerintah Daerah	Rp. 24.976.000,-	APBD
	<b>JUMLAH</b>	Rp. 4.634.401.013,-	

## Bab III

### ***Akuntabilitas Kinerja***

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja tahun 2020 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2020 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program /kegiatan pada tahun 2020 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Adapun Pengukuran Kinerja disajikan sebagai berikut :

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Evaluasi dan analisis capaian kinerja organisasi berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas kinerja yang sudah diperjanjikan untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kominfo Provsu tahun 2019—2023. Pengukuran kinerja indikator masing-masing yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Kominfo Provsu dalam mewujudkan visi dan misi organisasi selama periode 2019—2023.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja Dinas Kominfo Provsu pada 2020 Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan sasaran strategis target kinerjanya 100 % . Capaian ini merupakan akumulasi dari capaian masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan ***Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Provsu*** pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

##### **1. Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Publik**

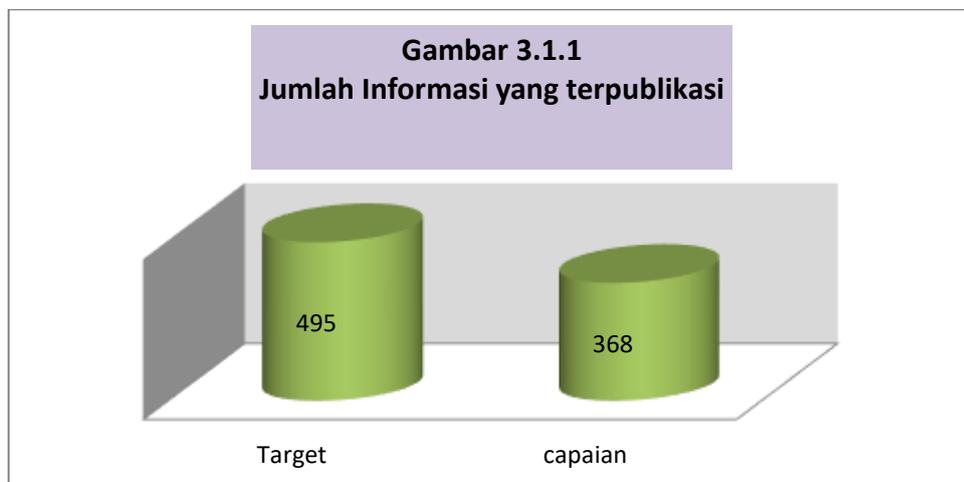
Capaian kinerja pada sasaran strategis pertama, yakni meningkatnya penyebarluasan Informasi Publik, sasaran strategis ini merupakan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. melalui media cetak saja, melainkan juga melalui media elektronik, media sosial bahkan media tradisional. Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik mengalami perkembangan yang baik. Capaian pada sasaran

strategis tersebut dipengaruhi oleh capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Jumlah Informasi yang terpublikasi dengan capaian kinerja sebanyak 368 kali melalui kegiatan dialog interaktif melalui televisi siaran sebanyak 2 kali, dialog interaktif melalui radio siaran 2 kali, Diseminasi informasi media luar ruang (media outdoor/media indoor) 95 kali, Berita Sumatera Utara melalui televisi siaran 268 paket, Pemberdayaan dan Pengembangan kelompok Informasi Masyarakat 1 kali.

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Jumlah Informasi yang terpublikasi	495 kali	368 kali

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian indikator Jumlah informasi yang terpublikasi realisasinya 368 kali, ini juga terjadi penurunan target dapat terlihat pada Gambar 3.1.1.



Sebagaimana gambar di atas, pencapaian indikator kinerja Jumlah Informasi yang terpublikasi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2019 sebesar 99 %, sedangkan tahun 2020 capaian indikator kinerja sebesar 74 % berarti ada penurunan sebesar 15 %, hal ini dikarenakan adanya refocusing kegiatan-kegiatan yang dialihkan ke dana covid -19.



Peningkatan layanan informasi publik sangat penting dalam mendorong percepatan pembangunan masyarakat informasi Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat. Masyarakat informasi dapat terwujud, manakala masyarakat memiliki kesadaran masyarakat untuk melek informasi. Menjadikan informasi sebagai kebutuhan dasar, seperti makan dan minum. Salah satu syarat tercapainya masyarakat informasi, tentu dengan kemudahan akses teknologi komunikasi, serta literasi memadai, agar teknologi tidak disalahgunakan (*unuseefull*).

Adapun ciri-ciri masyarakat informasi yang diharapkan yaitu :

1. Kebutuhan akan informasi sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat, baik untuk berinteraksi antar manusia maupun untuk menunjang kegiatan kerja, kegiatan Sosial, pengajaran, serta aktivitas lainnya,
2. Masyarakat informasi bergantung pada inovasi Teknologi yang terus berkembang,
3. *Spatial*, masyarakat informasi terhubung dengan lokasi yang mempunyai efek pada pengorganisasian waktu dan ruang,
4. *Occupational*, perubahan yang terjadi dalam masyarakat informasi menyebabkan perubahan dalam ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja di bidang informasi,
5. Masyarakat informasi mengalami perubahan siklus Budaya dalam kehidupan sehari-hari karena ketersediaan informasi dari berbagai saluran Media, termasuk Media sosial.

## 2. **Pesentase data OPD yang Terhimpun**

Saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menangani data. Data berperan penting dalam perencanaan dan perumusan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provsu.

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah, diperlukan sinergi antara BPS sebagai penyedia data dasar dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai penyedia atau sumber statistik sektoral. Disinilah diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari OPD dalam hal penyediaan data sektoral. Dengan data sektoral yang akurat dan berkualitas maka pembangunan akan lebih terarah. Jika data sektoral ini sudah terbangun di masing-masing OPD.

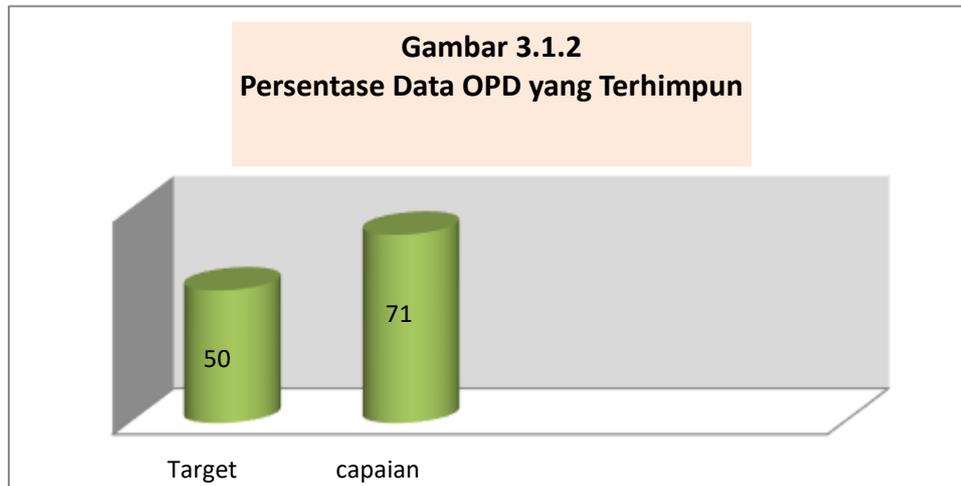
Capaian pada sasaran strategis tersebut dipengaruhi oleh capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan, yakni indeks data OPD yang terhimpun sebesar 71 %

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>
Persentase data OPD yang terhimpun	50 %	71 %

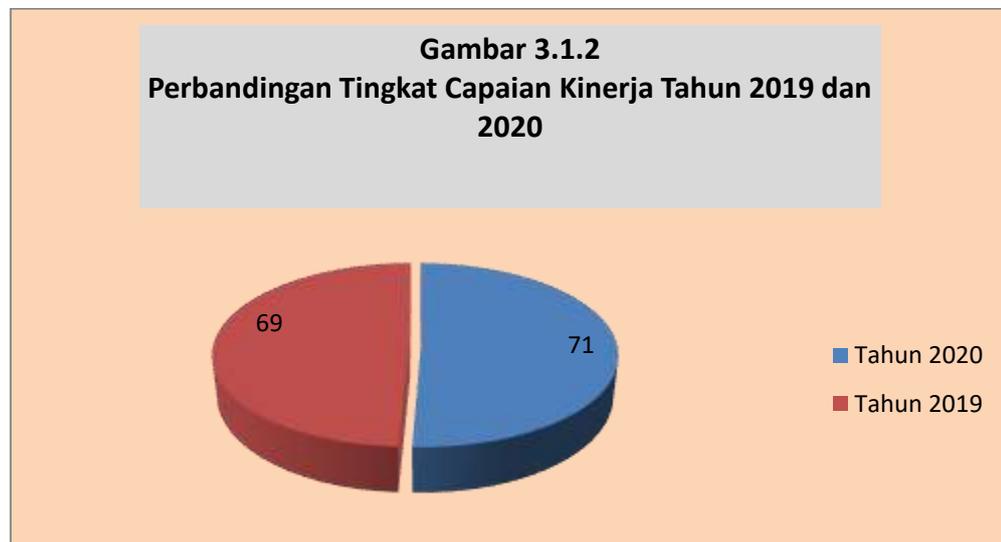
Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja untuk tahun kedua data yang dihimpun adalah data tahun 2019 yang merupakan hasil kompilasi dari 35 organisasi perangkat daerah adalah yaitu : Dinas Pendidikan, Dinas Tanaman pangan dan Holtikultura, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB daerah, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Pintu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan usaha kecil Menengah, Dinas Kehutanan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Energi dan Sumber daya Mineral, Dinas Sumber daya air, cipta karya dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Biro Hukum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kepegawaian Daerah, Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, Rumah sakit

Jiwa Prof DR. M.Ildrem, Rumah Sakit Haji Medan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Data OPD tersebut diolah dan disusun dalam bentuk Buku Statistik Sektoral

Capaian Kinerja dapat dilihat pada Gambar 3.1.2



Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja untuk data statistik sebesar 69 %, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 3 % menjadi 71 %.



### **3. Persentase Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi**

Target infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi 41%, pencapaian realisasi sebesar 44 % (aplikasi yang

terhubung dengan Smart Province sebanyak 22 aplikasi dari 19 Organisasi Perangkat Daerah yaitu :

**Daftar Aplikasi OPD Provsu Yang Terhubung Di Portal Sumut Smart Province**

NO	NAMA APLIKASI	URL/Alamat Aplikasi	OPD Penanggung Jawab
1	1. E-Planning 2. Geoportal Provinsi Sumatera Utara	<a href="https://eplanning.sumutprov.go.id/backend/web/index.php">https://eplanning.sumutprov.go.id/backend/web/index.php</a> <a href="http://geoportal.sumutprov.go.id/index.html">http://geoportal.sumutprov.go.id/index.html</a>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu
2	1. Paket Keras 2. Aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Provinsi Sumatera Utara	<a href="http://simpegbkd.sumutprov.go.id/site/login">http://simpegbkd.sumutprov.go.id/site/login</a> <a href="http://bkd.sumutprov.go.id/site/login">http://bkd.sumutprov.go.id/site/login</a>	Badan Kepegawaian Daerah Provsu
3	1. E-Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2. Dashboard Aset	<a href="http://ekeuangan.sumutprov.go.id/">http://ekeuangan.sumutprov.go.id/</a> <a href="http://simbada.sumutprov.go.id/dashboard/grafik.html">http://simbada.sumutprov.go.id/dashboard/grafik.html</a>	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provsu
4	JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)	<a href="http://jdih.sumutprov.go.id/">http://jdih.sumutprov.go.id/</a>	Biro Hukum Setda Provsu
5	Aplikasi Portal E-ASN	<a href="https://easn.sumutprov.go.id/e-asn/">https://easn.sumutprov.go.id/e-asn/</a>	Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu
6	siHarapanKu (PIHPS)	<a href="http://hargasumut.org/">http://hargasumut.org/</a>	Dinas Perindustrian

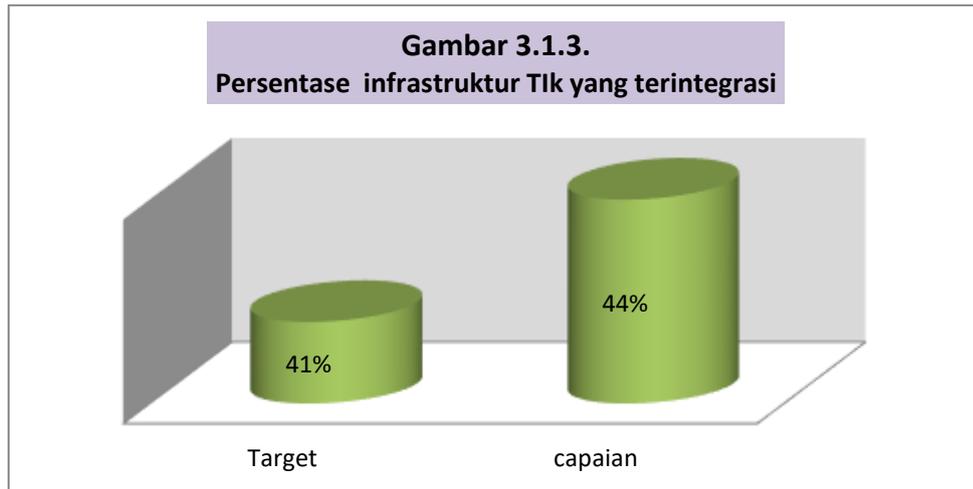
			dan Perdagangan Provsu
7	Database Jalan dan Jembatan	<a href="http://jalan.sumutprov.go.id/">http://jalan.sumutprov.go.id/</a>	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu
8	SIGA	<a href="http://siga.sumutprov.go.id/">http://siga.sumutprov.go.id/</a>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu
9	Siak Andaliman GDPK Provsu	<a href="http://gdpk.sumutprov.go.id/#7/1.830/98.751">http://gdpk.sumutprov.go.id/#7/1.830/98.751</a>	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Provsu
10	LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	<a href="http://lpse.sumutprov.go.id/eproc4">http://lpse.sumutprov.go.id/eproc4</a>	Biro Administrasi Pembangunan & Pbj Setda Provsu
11	E-Pendapatan	<a href="http://bpprd.sumutprov.go.id/">http://bpprd.sumutprov.go.id/</a>	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu
12	Statistik Perkebunan Provsu	<a href="http://disbun.sumutprov.go.id/statistik_2018/">http://disbun.sumutprov.go.id/statistik_2018/</a>	Dinas Perkebunan Provsu
13	Perizinan	<a href="https://siaplayani.sumutprov.go.id/">https://siaplayani.sumutprov.go.id/</a>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
14	Perpustakaan Digital	<a href="https://kubuka.id/disperpusiprovsvu/">https://kubuka.id/disperpusiprovsvu/</a>	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu

15	Inovasi Jurnal Publik dan Kebijakan	<a href="http://jurnal.balitbang.sumutprov.go.id/index.php/inovasi">http://jurnal.balitbang.sumutprov.go.id/index.php/inovasi</a>	Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu
16	Data Pokok Pendudukan Dasar dan Menengah	<a href="https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/guru/1/070000">https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/guru/1/070000</a>	Dinas Pendidikan Provsu
17	Dashboard Batas Kab/Kota Provsu	<a href="http://103.248.25.27/dashboard/">http://103.248.25.27/dashboard/</a>	Biro Pemerintahan Umum Setda Provsu
18	Corner PKP Provsu	<a href="http://dispkp.sumutprov.go.id/corner2/">http://dispkp.sumutprov.go.id/corner2/</a>	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu
19	Informasi Pasien Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem	<a href="http://rsj.sumutprov.go.id/information/">http://rsj.sumutprov.go.id/information/</a>	Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu

Capaian pada sasaran strategis tersebut dipengaruhi oleh capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan, yakni persentase Infrastruktur teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu :

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>
Persentase Infrastruktur TIK yang Terintegrasi	41 %	44 %

Dari tabel di atas, bahwa capaian indikator kinerja terlihat pada Gambar 3.1.2



Pada tahun 2020 capaian indikator kinerja untuk persentase Infrastruktur teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar 44 %, untuk tahun 2019 realisasi capaian kinerja sebesar 20 % adanya peningkatan sebesar 24 %



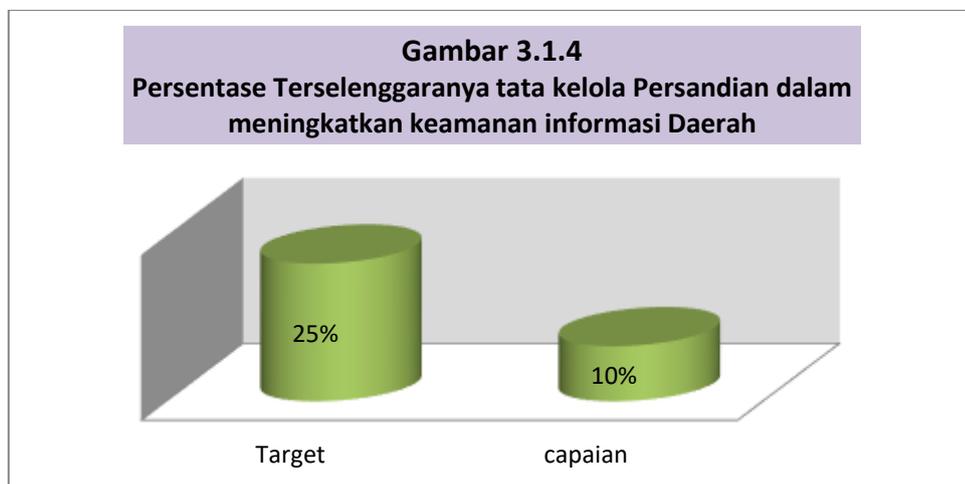
#### **4. Persentase Terselenggaranya tata kelola Persandian dalam meningkatkan keamanan informasi daerah**

Secara umum capaian kinerja pada sasaran strategis meningkatnya pengelolaan Persandian dan keamanan Informasi Daerah tersebut dipengaruhi oleh capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, capaian indikator Persentase terselenggaranya tata kelola Persandian dalam meningkatkan keamanan Informasi Daerah adalah :

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Persentase Terselenggaranya tata kelola Persandian dalam meningkatkan keamanan informasi Daerah	25 %	10 %

Dari tabel di atas, bahwa capaian indikator kinerja seperti terlihat pada Gambar 3.1.3



Sebagaimana gambar di atas, pencapaian indikator kinerja Persentase Terselenggaranya tata kelola Persandian dalam meningkatkan keamanan informasi Daerah dengan target 25 % dengan realisasi 10 %, pada tahun 2020 tidak ada peningkatan target capaian kinerja karena adanya refofusing anggaran untuk dana Covid -19. Dengan demikian target capaian kinerja tahun 2019 sama dengan capaian target tahun 2020 . Untuk persentase terselenggaranya tata kelola persandian dalam meningkatkan keamanan Informasi daerah yaitu Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memahami kemandirian Informasi sebanyak 5 OPD yaitu Dinas Kominfo Provsu, BPKAD, Bappeda, BKD dan Inspektorat.

Pada tahun 2020 realisasi capaian indikator kinerja untuk persentase terselenggaranya tata kelola Persandian dalam meningkatkan keamanan Informasi Daerah sama dengan tahun 2019 sebesar 10 %



### 3.2. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN RPJMD

Sebelum melakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Dinas Kominfo Provsu, terlebih dahulu akan ditelaah capaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara (RPJMD Provsu) tahun 2019-2023. Analisis capaian kinerja RPJMD Provsu tahun 2019-2023 berdasarkan indikator kinerja SKPD Dinas Kominfo Provsu mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, seperti pada tabel di bawah ini.

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
		2018*	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>I</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
1	Cakupan pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi	67 %	84 %	86 %	90 %	95 %	100 %	100 %

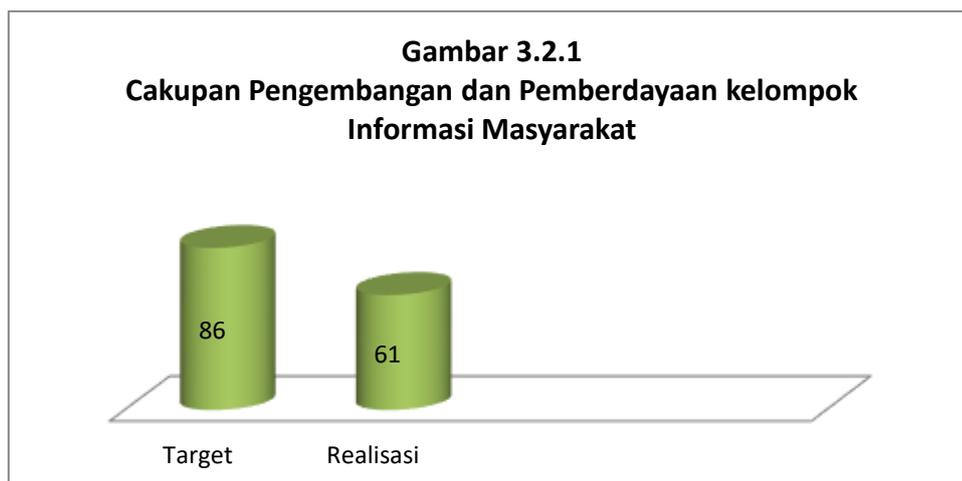
	Masyarakat Sumatera Utara							
2	Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	80 %	80 %	87 %	90 %	95 %	100 %	100 %
3	Rasio sistem pelayanan berbasis online	6 %	20 %	41 %	61 %	82 %	100 %	100 %
<b>II</b>	<b>Statistik</b>							
	Data Statistik Sektoral	-	25 %	50 %	75 %	85 %	100 %	100 %
<b>III</b>	<b>Persandian</b>							
	Persentase Perangkat Daerah yang memahami Persandian dan Keamanan Informasi	-	10%	25 %	55 %	75 %	100 %	100 %

dapat dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara melaksanakan 3 urusan Bidang Yaitu Urusan Bidang Kominfo , Urusan Bidang Statistik dan Urusan Bidang Persandian.

Hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu berdasarkan indikator kinerja

<b>Bidang Kominfo</b>			
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat	86 %	61 %

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja berdasarkan indikator Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat dengan persentase sebesar **61%**, seperti dapat terlihat pada Gambar 3.2.1

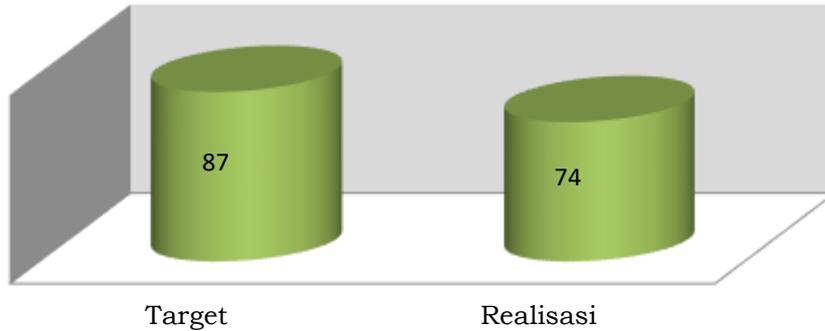


Sebagaimana gambar di atas, pencapaian indikator kinerja Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat menunjukkan hasil yang belum mencapai target, hal ini disebabkan tidak adanya kegiatan Pemberdayaan KIM yang mengakibatkan ada beberapa KIM di Kabupaten/kota yang tidak aktif lagi, hanya 20 Kab/kota yang masih aktif. Solusinya adanya peningkatan frekuensi Kegiatan pemberdayaan KIM di kab/kota. Untuk Capaian kinerja tahun 2020 sama dengan tahun 2019 karena pada tahun 2020 adanya refocussing anggaran untuk dana covid – 19.

<b>Urusan Bidang Kominfo</b>			
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	Cakupan pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	87%	74 %

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja berdasarkan indikator Cakupan pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik dengan persentase sebesar **74 %**. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 capaian kinerja sebesar 89 % terjadinya penurunan target sebesar 13 %, dikarenakan adanya refocussing anggaran untuk dana covid – 19, ini didapat terlihat pada Gambar 3.2.2

**Gambar 3.2.2**  
**Cakupan pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik**

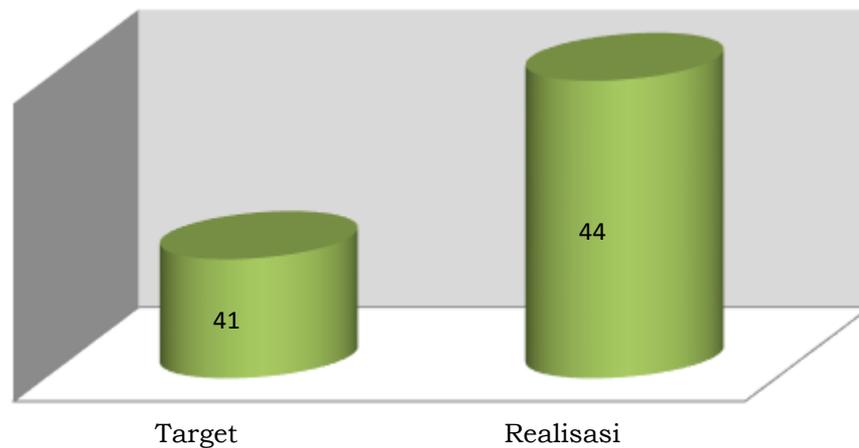


**Bidang Kominfo**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Rasio Sistem pelayanan berbasis online	41 %	44 %

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja berdasarkan indikator Rasio Sistem pelayanan berbasis online dengan persentase sebesar **44 %** dapat terlihat pada Gambar 3.2.3

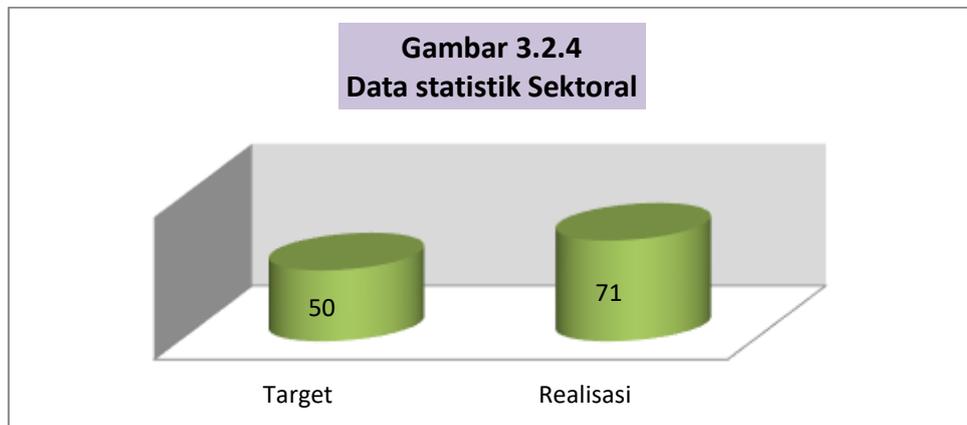
**Gambar 3.2.3**  
**Rasio Sistem pelayanan berbasis online**



Sebagaimana gambar di atas, pencapaian indikator kinerja masih tahap pengembangan operasional Smart Province kedepannya akan dilanjutkan dengan pengembangan konten dan aplikasi yang langsung ke masyarakat.

<b>Bidang Statistik</b>			
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	Data statistik Sektoral	50 %	71 %

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja berdasarkan indikator Data statistik Sektoral yang dihimpun dari OPD sebanyak 35 OPD dengan realisasi sebesar 71 % dapat terlihat pada Gambar 3.2.4

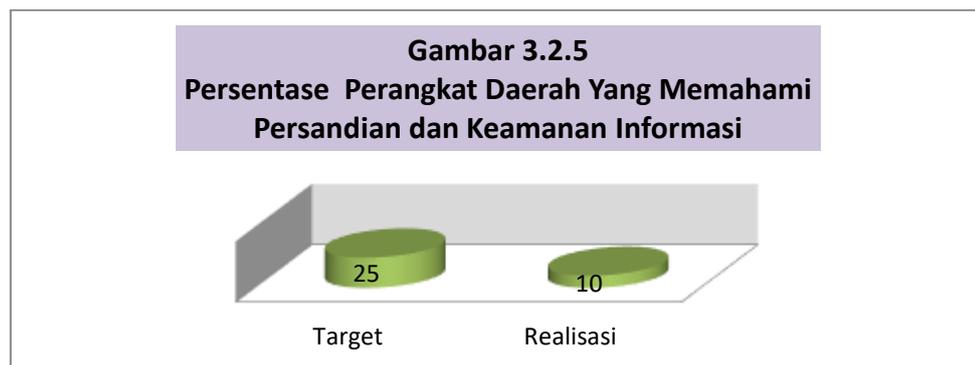


Capaian merupakan target awal untuk menciptakan satu data Pembangunan Sumatera Utara, kedepannya akan dilakukan peningkatan pengumpulan data sektoral melalui aplikasi Statistik Sektoral.

<b>Bidang Persandian</b>			
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	Persentase Perangkat daerah yang memahami Persandian dan Keamanan Informasi	25 %	10 %

Persentase Perangkat daerah yang memahami Persandian dan Keamanan Informasi sebanyak 5 Organisasi Perangkat Daerah yang memahami pentingnya Keamanan Informasi, yaitu Dinas Kominfo

Provsu, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektorat, Untuk kegiatan ini tidak ada peningkatan target. Untuk target tahun 2020 sama dengan tahun 2019, hal ini disebabkan karena adanya pengurangan anggaran/recofusing untuk dana Covid-19, kedepannya dengan adanya kegiatan Pelaksanaan informasi Pemerintahan berbasis Elektronik dan Non Elektronik diharapkan OPD akan lebih memahami pentingnya keamanan informasi.



### 3.3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

Di samping capaian kinerja berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Renstra Dinas Kominfo Provsu yang telah dijelaskan di atas, maka untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang capaian kinerja Dinas Kominfo Provsu tahun 2019. Pada dokumen laporan kinerja 2020 ini akan dipaparkan capaian kinerja program/kegiatan secara keseluruhan dan berdasarkan penetapan kinerja Dinas Kominfo Provsu tahun 2020.

#### 3.3.1 Capaian Kinerja Keseluruhan

Capaian kinerja keseluruhan Program Dinas Kominfo Provsu pada tahun 2020 sebesar **94,78 %**. Jika dibandingkan pada tahun 2019 capaian kinerjanya sebesar **84,09 %**. Oleh karena terjadinya peningkatan sebesar **10,69 %**.

Untuk itu Capaian kinerja keseluruhan Program Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara yaitu :

No	Program	Realisasi capaian %
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	95,15
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97,15
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	100
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	96,26
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	97,96
6	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	98,80
7	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	89,70
8	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	95,65
9	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	98,02

### 3.3.2 Capaian berdasarkan Penetapan Kinerja

Secara umum, capaian kinerja program/kegiatan Dinas Kominfo Provsu 2020 berdasarkan penetapan kinerja sudah menunjukkan adanya perkembangan yang sangat baik. Capaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2019 realisasinya 143%. Untuk Tahun 2020 capaian kinerja sebesar 90,75 %. Adapun rincian capaian kinerja pada 2020 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi
1	Meningkatnya penyebaran Informasi Publik	Jumlah informasi yang terpublikasi	495 kali	368 kali	74 %
2	Meningkatnya kualitas data pembangunan Sumatera Utara	Persentase OPD yang terhimpun	50 %	71 %	142 %
3	Meningkatnya pelaksanaan Sistem berbasis elektronik	Persentase Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi	41 %	44%	107 %

4	Meningkatnya pengelolaan Persandian dan keamanan informasi	Persentase terselenggranya tata kelola Persandian dalam meningkatkan keamanan informasi	25 %	10 %	40 %
---	--	---	------	------	------

### **3.4 ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN**

#### **3.4.1. Analisa keberhasilan**

Pada bahasan di atas, telah dijelaskan secara komprehensif bahwa secara umum capaian kinerja Renstra Dinas Kominfo Provsu pada tahun 2020 sesuai dengan target yang direncanakan (100%). Capaian keberhasilan ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor - faktor pendorong yaitu :

1. Sudah terbangunnya Infrastruktur TIK yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan membantu OPD dalam pengembangan aplikasi.
2. Terjalinnnya sinergitas Dinas Kominfo Provsu dengan Stakeholder (Bakohumas, TVRI, RRI, KIM, Petra dan Kabupaten/kota).
3. Peningkatan Penghimpunan data sektoral Pembangunan Sumatera Utara
4. Melaksanakan Penatausahaan urusan Persandian melalui berita Surat masuk, surat Keluar pada Kamar Sandi dan meningkatkan nilai indeks keamanan informasi melalui sosialisasi indeks keamanan informasi ke OPD dilingkungan Provinsi

#### **3.4.2. Analisis Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Dinas Kominfo Provsu melaksanakan langkah-langkah dalam perbaikan kinerja yaitu :

1. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur TIK dan aplikasi untuk mendukung SPBE ;
2. Peningkatan kualitas data Statistik sektoral;
3. Peningkatan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik melalui Media Sosial, Media cetak dan Elektronik ;

4. Peningkatan nilai indeks keamanan informasi melalui sosialisasi penyadaran akan pentingnya pengamanan informasi daerah.

### 3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN

#### 3.5.1 Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan Dinas Kominfo Provsu pada tahun 2020

Anggaran belanja Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 bersumber pada APBD Provinsi Sumatera Utara. Untuk APBD Murni sebesar **Rp. 43.387.598.091**, setelah adanya reconfusing anggaran Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara menjadi Rp. 28.207.667.902,04, selanjutnya pada P.APD Anggaran sebesar **Rp. 28.207.667.902,04**, dengan realisasi anggarannya sebesar **Rp. 26.736.337.956 (94,78%)**. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 jumlah anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebesar **Rp.45.771.662.255,-** dengan realisasi nya sebesar **Rp. 39.473.002.128,- (86,24 %)**. berarti terjadi peningkatan sebesar **8,54 %**.

Anggaran Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 adalah sebagai berikut:

No	Anggaran	APBD Murni	Adanya Recofusing	P.APD
1	Belanja Tidak Langsung	18.315.923.000,-	15.649.038.000,-	15.649.038.000,-
2	Belanja langsung	25.071.675.091,-	12.558.629.902,04,-	12.558.629.902,04,-
<b>Total Anggaran</b>		<b>43.387.598.091</b>	<b>28.207.667.902,04</b>	<b>28.207.667.902,04</b>

#### 3.5.2 Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan Dinas Kominfo Provsu pada tahun 2020 Berdasarkan Sasaran Strategis

Berdasarkan akuntabilitas keuangan, anggaran keuangan yang digunakan untuk ketiga sasaran strategis Dinas Kominfo Provsu pada tahun 2020 sebesar **Rp.4.634.401.013,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.462733.117,- ( 96 %)** yang terdiri dari :

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 485.139.000,-	Rp. 469.689.000,-
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 185.540.000,-	Rp. 183.315.000,-
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 3.938.746.013,-	Rp. 3.800.448.837,-
	Program Penyelenggaraan pengamanan Informasi pemerintah Daerah	Rp. 24.976.000,-	Rp. 9.280.280,-
<b>J u m l a h</b>		4.634.401.013,-	Rp. 4.462.733.117,-

)

## Bab IV

# Penutup

### A. Kesimpulan

Secara garis besar Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu telah berhasil melaksanakan tugas, fungsi, dan misi yang diembannya dalam mencapai sasaran strategis tahun 2020. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam perspektif prospek internal, sasaran strategis perspektif layanan, serta sasaran strategis perspektif pemangku kepentingan (kelembagaan) yang merupakan dampak dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Tingkat capaian target kinerja Dinas Kominfo Provsu pada tahun 2020 dengan realisasinya 90,75 %, sedangkan pada tahun 2019 Capaian kinerja sebesar 143 %.
2. Dari sisi akuntabilitas keuangan, serapan keuangan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dari APBD TA. 2020 sebesar Rp. **26.736.337.956,-** (94,78 %), sedangkan pada tahun 2019 serapan keuangannya sebesar Rp. **39.473.002.128,-** (86,24%), dengan demikian di tahun 2020 adanya peningkatan serapan keuangan sebesar **8,54 %**.

### B. Rekomendasi

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sepanjang tahun 2020 dan untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, perlu dilakukan hal-hal berikut:

1. Pengembangan layanan infrastruktur dan aplikasi Sumut Smart Province dalam upaya mendukung kota cerdas.
2. Pengembangan konten-konten pengelolaan informasi dan komunikasi publik
3. Penyempurnaan pengembangan aplikasi data statistik dalam upaya mengintegrasikan data kepada organisasi perangkat daerah (OPD) maupun Kabupaten/kota.
4. Peningkatan keamanan informasi.



## **REVISI KEDUA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. Irman, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Edy Rahmayadi  
Jabatan : Gubernur Sumatera Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2020

Pihak Kedua,  
Gubernur Sumatera Utara

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Sumatera Utara

( **Edy Rahmayadi** )

( **Ir. H. Irman, M.Si** )  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610905 199003 1 004

**REVISI KEDUA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA**

No (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya penyebaran informasi publik	Jumlah Informasi Publik yang terpublikasi	495 kali
2.	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan Sumatera Utara	Persentase data OPD yang terhimpun	50%
3.	Meningkatnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Terintegrasi	41%
4	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi Daerah	Persentase terselenggaranya tata kelola Persandian dalam meningkatkan keamanan Informasi Daerah	25%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 485.139.000,-	APBD
2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 185.540.000,-	APBD
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 3.938.746.013,-	APBD
4. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Rp. 24.976.000,-	APBD
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 4.634.401.013,-</b>	

Gubernur Sumatera Utara

(Edy Rahmayadi)

Medan, 2020  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Sumatera Utara

( Ir. H. Irman, M.Si)  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610905 199003 1 004